



**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026**

**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129
E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: <http://disbun.sumselfprov.go.id>*

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Tujuan	1
2. Sasaran	1
3. Belanja APBD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	3
4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah	5
5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)..	6
B. Latar Belakang Penyusunan Laporan	6
1. Maksud	6
2. Tujuan	6
BAB II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD TRIWULAN II TAHUN 2026	7
A. Realisasi Belanja APBD	7
B. Indikator Kinerja OPD	7
C. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah.....	7
BAB III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT..	8
BAB IV. PENUTUP	9
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP), dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

1. Tujuan

Dinas perkebunan menetapkan tujuan jangka menengah yaitu meningkatkan kesejahteraan petani sub sektor perkebunan. Ada empat komoditas utama perkebunan yang menjadi perhatian penting karena memiliki luasan yang cukup besar. Adapun komoditas tersebut adalah Kopi, Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit.

2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan pada pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan
- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	1. Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1) Melakukan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani perkebunan
		2) Mendorong pengembangan lahan-lahan perkebunan sesuai dengan potensi dan kawasan sentra-sentra komoditi unggulan
		3) Mengembangkan perbenihan dan fasilitas sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat
		4) Meningkatkan ketersediaan sarana air mendukung peningkatan produksi
		5) Meningkatkan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Perlindungan Usaha Perkebunan yang berwawasan lingkungan
		6) Terus melakukan peningkatan ketersediaan Alat dan Mesin Perkebunan agar budidaya perkebunan lebih efektif dan efisien diwilayah pengembangan perkebunan
		7) Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan dalam memanfaatkan pengembangan serta penumbuhan industri hilir
		8) Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan dan meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan
		9) Mendorong pelaksanaan rehabilitasi tanaman-tanaman perkebunan yang kurang produktif.

3. Belanja APBD Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Pagu anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 23.309.752.911,-, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	: Rp. 23.309.752.911,-
◆ Belanja Pegawai	: Rp. 14.570.274.564,-
◆ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 8.739.478.347,-
Belanja Modal	: Rp. 0,-
◆ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 0,-
◆ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 0,-

Pagu anggaran sebesar Rp. 23.309.752.911,- terdiri atas 6 program, 14 kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - 3) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
 - c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 2) Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan izin Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan
 - 1) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan		Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	130,35	116
1.a		Meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan	Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,46	0,109
				Ton	1.008.362,07	1.009.461,18
			Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,87	0,447
				Ton	3.399.995,63	3.430.391,22
			Persentase peningkatan produksi Kopi	%	5,12	3,715
				Ton	218667,51	235.211,760
			Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0,14	0,770
				Ton	61647,2	62.121,88
1.b		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Aktif dari SAKIP	Nilai atau skor	80,72	80,00

Beberapa Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan juga menjadi bagian Indikator Kinerja Daerah yang tercantum dalam RPJMD, yaitu:

1. Persentase peningkatan produksi Karet (%),
2. Persentase peningkatan produksi Kopi (%),
3. Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit (%), dan
4. Persentase peningkatan produksi Kelapa (%).

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Penetapan lokasi pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 sudah ditetapkan meskipun ada beberapa sub kegiatan saat ini masih dalam proses CP/CL. Adapun sub kegiatan yang sudah ditetapkan lokasinya adalah:

1. Pengelolaan penerbitan sertifikat benih, lokasinya adalah kabupaten/kota yang ada produsen benih perkebunan seperti Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Palembang, Sekayu, dan Kab. Lahat.
2. Pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme, lokasi pelaksanaan adalah kebun sumber benih yang ada di Desa Mainan Kabupaten Banyuasin.
3. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani, dengan lokasi 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang akurat dan objektif kepada pihak yang membutuhkan, meningkatkan akuntabilitas serta sebagai alat evaluasi terhadap capaian program/kegiatan/sub kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk:

1. Mendorong transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kepada pemangku kepentingan
2. Menilai capaian target kinerja yang telah ditetapkan diawal perencanaan kerja
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan kedepan
4. Menjadi bahan dalam identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.

BAB II.
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD
TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Realisasi Belanja APBD

Tabel 3. Realisasi Belanja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	
		KEUANGAN (Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	23.309.752.911	7.194.891.773	30,87
- Belanja Pegawai	14.570.274.564	6.019.554.349	41,31
- Belanja Barang dan Jasa	8.739.478.347	1.175.337.424	13,45
BELANJA MODAL	0	-	-
TOTAL BELANJA	23.309.752.911	7.194.891.773	30,87

Realisasi pelaksanaan pogram/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

B. Indikator Kinerja OPD

Tabel 4. Realisasi capaian perjanjian kinerja (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	%	116,00	150,34	123,09	Data BPS Sumsel sd. Juni 2026
2.	Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Karet	%	0,11	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
			Ton	1.009.461,18	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	%	0,45	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
			Ton	3.430.391,22	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
		Persentase Peningkatan Produksi Kopi	%	3,72	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
			Ton	235.211,76	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	%	0,77	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
			Ton	62.121,88	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun
3.	Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	Skor	80,00	-	-	Baru bisa dihitung di akhir tahun

C. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

Belum ada penghargaan yang diraih Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sepanjang triwulan II tahun 2026.

BAB III.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Efisiensi dan pergeseran anggaran mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, sepanjang triwulan II tahun anggaran 2026. Kebijakan efisiensi dan pergeseran anggaran berpengaruh langsung terhadap dinamika operasional, beberapa kegiatan mengalami penyesuaian/ rasionalisasi target output, penundaan jadwal pelaksanaan guna menyelesaikan proses administrasi perubahan DPA. Meskipun demikian Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penyesuaian ini tidak mengurangi esensi dan kualitas output dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

BAB IV. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Perkebunan sepanjang triwulan II Tahun Anggaran 2026. Semoga laporan ini dapat membantu memantau progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pencapaian target. Dan adanya evaluasi secara berkala ini dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Palembang, 14 Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ICHWANSYAH, SP., M.Si.

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

NIP. 19701016 200112 1003

APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	50%	18.532.557.372	7.114.746.087	38,39	19,24				-
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah	Tahun	1	0,0	14.780.274.564	6.053.794.349	40,96	20,83				-
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.680	0,0	14.570.274.564	6.019.554.349	41,31	59,00	DAU dan PAD	Disbun	-	-
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	0,0	210.000.000	34.240.000	16,30	18,00	PAD	Disbun	-	-
B.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tahun	1	0,0	20.000.000	-	- ,00	2				-
1.	Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0,0	20.000.000	-	- ,00	2	PAD	Disbun	-	-
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1	0,0	11.000.000	10.520.000	95,64	100				-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2,0	11.000.000	10.520.000	95,64	100	PAD	Disbun	-	-
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah	Tahun	1	0,0	378.000.000	79.025.608	20,91	22,17				-
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0,0	30.000.000	6.387.000	21,29	22,00	PAD	Disbun	-	-
2.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0,0	98.000.000	14.455.000	14,75	15,00	PAD	Disbun	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	0,0	250.000.000	58.183.608	23,27	25,00	PAD	Disbun	-	-
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun	1	0,0	3.025.282.808	915.875.905	30,27	32,00				-
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0,0	12.000.000	5.276.000	43,97	45,00	PAD	Disbun	-	-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0,0	522.422.808	200.344.905	38,35	39,00	PAD	Disbun	-	-
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0,0	2.490.860.000	710.255.000	28,51	30,00	PAD	Disbun	-	-
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun	1	0,0	318.000.000	55.530.225	17,46	18,00				-
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	60	0,0	300.000.000	49.393.725	16,46	17,00	PAD	Disbun	-	-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	0,0	18.000.000	6.136.500	34,09	35,00	PAD	Disbun	-	-
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	Ha	150	0,0	715.000.000	27.818.378	3,89	6,00			Pengentasan Kemiskinan	-
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Laporan	1	0,0	575.000.000	10.364.690	1,80	4,00			Pengentasan Kemiskinan	-
1.	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	Laporan	1	0,0	575.000.000	10.364.690	1,80	4,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
B.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Dokumen	3	0,0	115.000.000	14.113.688	12,27	14,00			Pengentasan Kemiskinan	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Sertifikat	4200	0,0	75.000.000	14.113.688	18,82	20,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
2.	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Laporan	1	0,0	15.000.000	-	- ,00	2,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
3.	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	0,0	25.000.000	-	- ,00	2,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
C.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi	Tahun	1	0,0	25.000.000	3.340.000	13,36	14,00			Pengentasan Kemiskinan	-
1.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	0,0	25.000.000	3.340.000	13,36	14,00	PAD	Kab. Banyuasin	Pengentasan Kemiskinan	-
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persertase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	%	100	0,0	25.000.000	-	- ,00	-			Pengentasan Kemiskinan	-
A.	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan	dokumen	2	0,0	25.000.000	-	- ,00	-			Pengentasan Kemiskinan	-
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	0,0	25.000.000	-	- ,00	-	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Areal yang tertanggunjungi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (Ha)	Ha	375	0,0	554.945.539	25.969.452	4,56	6,00			Pengentasan Kemiskinan	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (kegiatan)	Kegiatan	2	0,0	554.945.539	26.969.452	4,86	6,00			Pengentasan Kemiskinan	-
1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	125	0,0	454.945.539	6.112.581	1,34	3,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
2.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Pengawasan Kebakaran Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	250	0,0	100.000.000	20.856.871	20,86	22,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina	%	20	0,0	35.000.000	5.355.620	15,30	16,00			Pengentasan Kemiskinan	-
A.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan	Dokumen	1	0,0	35.000.000	5.355.620	15,30	16,00			Pengentasan Kemiskinan	-
1.	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	16	0,0	35.000.000	5.355.620	15,30	16,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
VI	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	100	0,0	3.447.250.000	20.002.236	0,58	2,00			Pengentasan Kemiskinan	-
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)	Kelompok	94	0,0	3.427.250.000	18.503.736	0,54	2,00			Pengentasan Kemiskinan	-
1.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	94	0,0	3.427.250.000	18.503.736	0,54	2,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
B.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan	Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)	Kelompok	1	0,0	20.000.000	1.498.500	7,49	8,00			Pengentasan Kemiskinan	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	1	0,0	20.000.000	1.498.500	7,49	8,00	PAD	Kab/kota	Pengentasan Kemiskinan	-
	Jumlah Program: 6 Jumlah Kegiatan: 14 Jumlah Sub Kegiatan: 23	-				23.309.752.911	7.194.891.773	30,87	42,44				-

Palembang, 19 Juli 2026

